

	News Title : Bappebti Blokir 1.327 Situs Investasi Abal-abal hingga Agustus 2023	
	Media Name : detik.com	Journalist : Aulia Damayanti
	Publish Date : 15 August 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Fintech	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

detikFinance > Fintech

Bappebti Blokir 1.327 Situs Investasi Abal-abal hingga Agustus 2023

Aulia Damayanti - detikFinance

Selasa, 15 Agu 2023 10:38 WIB



Foto: (Aulia Damayanti/detikcom)

Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.327 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pada Januari-Agustus 2023. Pemblokiran dilakukan Bappebti dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebti dalam menegakkan potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan langkah pemblokiran pada situs web investasi ilegal itu dilakukan agar tidak merugikan masyarakat.

"Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," tegas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, dalam keterangannya dikutip, Selasa (15/8/2023).

Meskipun Bappebti telah memblokir domain situs web entitas ilegal, masih banyak ditemukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK ilegal di tengah masyarakat.

Baca juga:

Transaksi Kripto Tembus Rp 66 T, dari Bitcoin sampai Ethereum

Didit menekankan kepada entitas-entitas ilegal yang telah diblokir tersebut agar mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti dan menurunkan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelahnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti. Berikutnya, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebti, Bappebti dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Aldison.

Aldison juga mengimbau kepada entitas ilegal di bidang PBK untuk mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kepada masyarakat, Bappebti tidak akan lelah mengimbau agar lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.

Aldison mendorong masyarakat selalu memastikan legalitas piagam berjangka yang menawarkan investasi dan jangan mudah tergur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, peniksa terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya, mengakses website resmi Bappebti di tautan <https://ceklegalitas.bappebti.go.id/>," tandas Aldison.

Dalam keterangan Bappebti, ada 1.327 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang telah diblokir. Catatannya tidak hanya situs web tetapi juga pemblokiran pada aplikasi, media sosial.

(ada/trdi)